



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASSADRI ZULKARNAIN, ST
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 521151

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.889.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/180 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
6. Tanah Seluas 4100 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.230.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 189.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 212.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG SUPER Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000



4. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
5. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 135.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 46.099.075

F. HARTA LAINNYA Rp. 50.000.000

Sub Total Rp. 3.333.099.075

III. HUTANG Rp. 75.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.258.099.075

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.